



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

A

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 8 April 2016 No. 28

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : LEGISLATIF

LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : MASINTON PASARIBU, S.H.
- 2. Jabatan : ANGGOTA - DPR RI PERIODE 2014 - 2019
- 3. Alamat Kantor : Jl. JEND. GATOT SUBROTO NO. 6, JAKARTA PUSAT
- 4. Tanggal Pelaporan : 22 September 2015

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK Rp. 700.000.000
(TANAH DAN BANGUNAN)

- 1. Tanah seluas 105 m² , di Kota JAKARTA TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2005 sampai dengan 2014 NJOP Rp.700.000.000

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI Rp. 448.000.000
DAN MESIN LAINNYA

- 1. Mobil, merk TOYOTA FORTUNER, tahun pembuatan 2012, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2012 nilai jual Rp.340.000.000
- 2. Mobil, merk DAIHATSU XENIA, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009 nilai jual Rp.108.000.000

b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA Rp.	0
c. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.	0
C. SURAT BERTAHAGA Rp.	0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA Rp.	319.210.000
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.319.210.000		
E. PIUTANG Rp.	0
TOTAL HARTA (II) Rp.	1.467.210.000
III. HUTANG Rp.	0
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III) Rp.	1.467.210.000

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
DEPUTI

Jakarta, 23 Februari 2016
DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN
Pemeriksaan LHKPN
DIREKTUR

TTD
PAHALA NAINGGOLAN

TTD
CAHYA H. HAREFA

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.